

- ANGKATAN PERKOTAAN
- LEMBAGA NEGARA

SKRIPSI

JOSHUA VICTOR

KEBERADAAN ABRI DI LEMBAGA PERWAKILAN

**Suatu Tinjauan Yuridis, Historis Dan Politis Terhadap Legalitas
ABRI Sebagai Golongan Fungsional Dan Pengangkatannya Di
MPR / DPR RI**



KK
Tgl. 21/10/98
Vic
K.

UNAIR
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

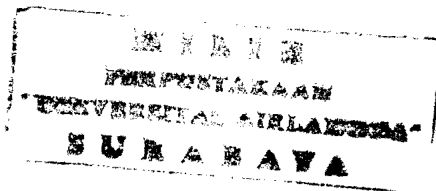
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

1998

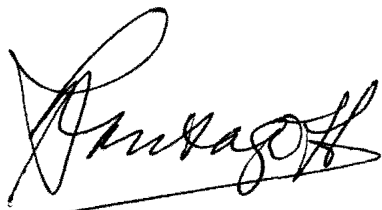
KEBERADAAN ABRI DI LEMBAGA PERWAKILAN

**Suatu Tinjauan Yuridis, Historis Dan Politis Terhadap Legalitas
ABRI Sebagai Golongan Fungsional Dan Pengangkatannya Di
MPR / DPR RI**

**Diajukan sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**



Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Harun Alsagoff".

HARUN ALSAGOFF, S.H., MA.
NIP. 130541985

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Victor".

JOSHUA VICTOR
NIM. 039313713

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**


1998

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
pada hari Kamis, 19 Pebruari 1998.

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Hj. Romlah Sartono, S.H., MS.

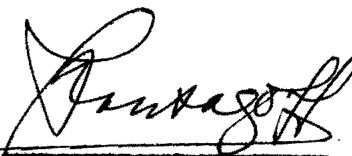




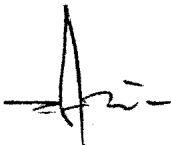
Sekretaris : Soekardi, S.H.

Anggota :

1. Harun Alsagoff, S.H., MA.



2. Himawan Estu Bagijo, S.H.



3. Udin, S.H.

(berhalangan hadir)

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari masalah, penjelasan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, kini dapatlah ditarik beberapa kesimpulan bahwa :

1. Ide pengangkatan golongan-golongan di lembaga perwakilan adalah dalam rangka mewakili semua golongan/ lapisan yang ada dalam masyarakat. Namun golongan tersebut ditujukan kepada badan-badan seperti Koperasi, Serikat Sekerja dan lain-lain Badan kolektif, bukan badan/ golongan ABRI.
2. Dengan demikian ketentuan dalam UU No. 1/ Tahun 1985 jls. UU No. 2/ Tahun 1985 jls. Tap MPR No. III/ MPR/ Tahun 1988 dan berbagai perangkat hukum lainnya yang menyebutkan bahwa anggota MPR terdiri dari anggota DPR ditambah Utusan Daerah dan Golongan, ABRI, Partai Politik dan Golongan Karya lainnya adalah bertentangan menurut pasal 2 ayat (1) UUD 1945.
3. Kehadiran ABRI dalam lembaga perwakilan yang hanya didasarkan pada "Konsensus Nasional" disamping tidak memiliki dasar hukum yang kuat, juga tidak sesuai dengan isi dan penjelasan pasal 2 ayat (1) UUD 1945 serta bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.
4. Pengangkatan ABRI dalam dua lembaga perwakilan dari segi jumlah perlu ditinjau kembali karena telah menimbulkan ketimpangan kuantitas yang cukup besar terhadap perolehan suara dari Partai Politik.

5. Infiltrasi dan penguasaan oleh ABRI terhadap semua lembaga kekuasaan negara telah melahirkan kesan adanya dominasi ABRI dalam Negara. Oleh karena itu, ABRI yang memainkan peran stabilisator dan dinamisator dalam rangka implementasi dwi fungsi ABRI sejauh yang menyangkut pelaksanaan fungsi sosial politik (kekaryaan) harus diwujudkan dalam tugasnya sebagai bagian dari eksekutif sesuai dengan pasal 10 UUD 1945.

2. Saran

Dalam rangka menghadapi masalah-masalah yang semakin kompleks dewasa ini, dibutuhkan suatu lembaga perwakilan yang kuat dan dapat melaksanakan tugas-tugas pengembanan terhadap rakyat secara optimum. Namun demikian, tercapainya DPR/ MPR melaksanakan tugasnya secara optimum adalah disamping melalui anggota yang berperan secara optimum pula, juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara mereka dapat menduduki jabatan tersebut dan bagaimana proses pembentukan/ penyusunannya. Untuk maksud diatas, dalam penulisan skripsi ini, penulis menyarankan dua hal yakni :

1. Merubah/ memperbaharui ketentuan hukum yang mengatur tentang Pemilihan Umum (UU No. 1/ Tahun 1985) dan Susunan Keanggotaan DPR/ MPR RI (UU No. 2/ Tahun 1985) serta Tap MPR No. III/ MPR/ Tahun 1988 tentang Pemilu khususnya substansi yang mengatur keanggotaan golongan ABRI.
2. Ketentuan dimaksud sekaligus memberikan penegasan terhadap hubungan ABRI dengan Golongan Karya.

3. Membuat ketentuan hukum yang baru, tegas dan jelas tentang penerapan doktrin dwi fungsi ABRI, khususnya fungsi sosial politik dalam bidang eksekutif demi kepastian hukum di Indonesia.